

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, UUI Press, Yogyakarta.
- Abduk R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dr. Halim HS.,S.H.,M.S., 2019, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- M. Luthfi Hadi Darius , 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UUI Press, Yogyakarta.
- Purwadarminta, S, 2010, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*, Farah Production, Bandung.
- Supriadi, 2019, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Jakarta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-10, PT Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Pembebanan Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Prosedur Pendaftaran Fidusia secara elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibuat supaya pelaksanaannya jadi efektif dan tepat sasaran

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

C. Sumber Lainnya

Yoyon Maulana Darusman, “*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*”,
<https://www.neliti.com/publications/53204/kedudukan-notaris-sebagai-pejabat-pembuat-akta-otentik-dan-sebagai-pejabat-pembu>, diakses pada hari rabu tanggal 12 oktober 2022, pukul 14.00 WIB.

Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali, “*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep *Euality Before The Law**”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Unsyiah,
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=135044&val=944&title=Kedudukan%20Notaris%20Sebagai%20Pejabat%20Umm%20Diti>, diakses pada hari Jum’at tanggal 14 oktober 2022, pukul 00.30 WIB.

Melati Gladys Oktavinadya, “*pertanggungjawaban notaris dalam pendaftaran fidusia online terhadap penerima fidusia*”,
<https://www.neliti.com/id/publications/213037/pertanggungjawabannotarisdalampendaftaranfidusiaonline>, diakses pada hari kamis, tanggal 13 oktober 2022, Pukul 17.00 WIB.

Fandy Ahmad, “*keabsahan kuasa untuk menandatangani akta oleh lembaga pembiayaan jaminan fidusia suatu kajian peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2015*” <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1037/673>, diakses pada hari Selasa, tanggal 25 oktober 2022, pukul 21.00 WIB.